

# PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**SERLI PATULAK**

***Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin***

***(B111 09 044)***

---

## ABSTRAK

SERLI PATULAK. *Pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi* (dibimbing oleh H.M.Said Karim dan Amir Ilyas)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, (2) faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh lembaga Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empirik. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan mengenai pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar belum berjalan optimal karena masih banyaknya faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor tersebut antara lain : 1. kurangnya jumlah personil anggota Kejaksaan, 2. dana operasional masih kurang, 3. sarana dan prasarana yang kurang memadai, 4. kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi masih sangat terbatas, 5. membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, dan 6. pemanggilan saksi secara berulang-ulang.

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechstaat*), sehingga Negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Konsekuensi yang timbul kemudian adalah Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan.

Hukum pada hakikatnya sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya beraneka ragam tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya sekedar memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga mencegah perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara dari penyimpangan dan penyangkalan.

Salah satu kajian hukum yang paling penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap

pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana terbagi atas 2 (dua) yaitu hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana, dan hukum pidana formil yaitu cara negara dengan perantara para pejabatnya dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan-aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang fenomenal yang marak terjadi yaitu kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dikalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah menjadi gaya hidup orang banyak saat ini, terbukti dengan semakin merambahnya budaya korupsi mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh [transparency.org](http://transparency.org) tahun 2012, sebuah lembaga independen dari 146 (seratus empat puluh enam) negara mencatat bahwa ada sepuluh negara terkorup di dunia, yaitu: 1.Azerbaijan, 2.Bangladesh, 3.Bolivia, 4.Kamerun, 5.Indonesia, 6.Irak, 7. Kenya, 8.Nigeria, 9.Pakistan, 10.Rusia.

Data tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara terkorup kelima di dunia, dan menduduki peringkat pertama negara terkorup di tingkat Asia-Pasifik. Selanjutnya 5 (lima) negara terkorup se-Asia Pasifik menurut survey [transparency.org](http://transparency.org) : 1.Indonesia, 2.Kamboja, 3.Vietnam, 4.Filipina, 5.India. Suatu survey yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sangat membahayakan kehidupan perekonomian nasional sehingga dianggap

sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya, padahal kesulitan itu disebabkan oleh korupsi.

Berbagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan *while collar crime* atau kejahatan kerah putih. Peran Jaksa yang sangat penting dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diperkuat oleh rumusan Pasal 27 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung”.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, agar perkara ini dapat diselesaikan oleh Jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.

## **B. Pengertian Dasar**

### **1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan**

Pengertian Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat 6 a dan ayat 6b KUHAP, sebagai berikut :

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- b) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat 6a ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 bagian ketentuan umum sebagai berikut :

- a) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang- undang.
- b) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- d) Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkorelasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persidangan.

Sedangkan yang dimaksud Kejaksaan menurut Undang- Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. dalam Pasal 2 memberikan pengertian :

- a) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.



Para pakar asing ilmu hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

- a) *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

*Delik* yang dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti :

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi delik, yakni *Delik* adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”

Selanjutnya Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Sementara Jonkers merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

*Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe<sup>1</sup> sebagai: “pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.

Istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana tersebut tidak mengikat yang mana yang digunakan asal tidak mengubah makna dari kata *strafbaarfeit*.

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin :*corruption*=penyuapan; *corruptor*=merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya . Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
  - b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
  - c) “Korup” (busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
  - d) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
  - e) Koruptor (orang yang korupsi).
-

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah “perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara”.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum

Menurut Max Weber Korupsi adalah “tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.

Selanjutnya, menurut *Transparency International* korupsi adalah “perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi sebagai berikut :

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

#### **4. Kewenangan Kejaksaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diberi wewenang sebagai penyidik, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa

:

“Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang - undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara garis besar ada empat institusi penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yaitu penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri, PPNS berdasarkan usul departemen yang bersangkutan diangkat oleh Menteri Kehakiman, penyidik TNI-AL diangkat oleh Panglima TNI, dan penyidik kejaksaan yang diangkat oleh Jaksa Agung. Mekanisme kerja dari keempat institusi penyidik tersebut juga berbeda-beda yaitu ada yang melakukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan penyidik Polri dan ada yang langsung menyerahkan berkas perkaranya ke penuntut umum berdasarkan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil, serta UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 menegaskan bahwa :

a) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c) Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - 2) pengawasan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
  - 4) pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa :

“Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

## **5. Tahap Penanganan Tindak Kasus Pidana Korupsi oleh Kejaksaan**

### **a) Penyelidikan**

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 Ayat (5) KUHAP). Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Sasaran mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP dan Pasal 5 KUHAP dapat disimpulkan bahwa maksud penyelidikan adalah untuk memastikan sesuatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana.

### **b) Penyidikan**

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. (Pasal 1 Ayat (2) KUHAP).



Proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi juga berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-518/A/ J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan kelaziman praktik penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan atau informasi seseorang tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum "Pemberhentian Penyidikan" ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya. Namun, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) KUHP).

#### c) Penuntutan

- 1) Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 Ayat (7) KUHP).
- 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh penetapan Hakim (Pasal 1 Ayat 6b).

Pengertian “*penuntutan*” atau “*vervolging*” menurut kacamata doktrin ilmu hukum sebagai berikut :

- 1) R. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa “ penuntutan adalah menuntut terdakwa dimuka Hakim Pidana, menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.
- 2) Sudarto berpendapat bahwa “Penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*)”.
- 3) Selanjutnya menurut IGM Nurdjana, “penuntutan adalah suatu tindakan Penuntut Umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan, atau konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya”.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi belum dapat berjalan optimal karena masih banyaknya faktor-faktor yang menghambat dalam penanganan kasus ini. Faktor-faktor yang menjadi kendala lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi antara lain: kurangnya jumlah personil Kejaksaan, dana operasional yang masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan masih sangat terbatas, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, pemanggilan saksi secara berulang-ulang karena saksi sedang berada di luar kota, atau bahkan telah berpindah tempat.

### **Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuskan saran, karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi saat ini dengan motif yang beragam dan canggih karena dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka hendaknya kewenangan yang diberikan kepada KPK khususnya dalam hal pemblokiran rekening secara langsung juga diberikan kepada pihak Kejaksaan, agar pihak kejaksaan tidak harus terlebih dahulu meminta izin kepada Gubernur Bank Indonesia jika ingin melakukan pemblokiran rekening karena hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebaiknya regulasi ke depan mengatur mengenai penyediaan saksi ahli dalam bidang keuangan negara pada lembaga Kejaksaan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atau, memberikan kewenangan kepada

saksi ahli dalam hal ini untuk ikut serta dalam proses penyidikan dalam mencari dan menemukan dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara sehingga proses perhitungan kerugian keuangan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama.

## KEPUSTAKAAN

### Buku

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- .2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Republik Institute
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Bambang Sujatmiko. 2011. Eksistensi Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Sosioscientia*. volume 3 No. 1; 39-50
- Chaeruddin,dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama
- Ermansyah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Firman Wijaya. 2008. *Peradilan Korupsi*. Jakarta: Penaku bekerjasama dengan Maharini Press
- IGM Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Juniver Girsang. 2012. *Abuse Of Power*. Jakarta: JG Publishing
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika

Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika

Luhut M.P.Pangaribuan. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan

O.C.Kaligis. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Penerbit PT Alumni

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

R.Soeroso. 2010. *Hukum Acara Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika

Robert Kutgaard. 2005. *Membasmi Korupsi*. DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

Suyatno. 2005. *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

### **Peraturan Perundang - Undangan :**

KUHP dengan penjelasannya

UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) dan penjelasannya

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Internet:**

Detik Forum, "Daftar 10 Negara Terkorup di Dunia 2012" diakses dari <http://forum.detik.com/daftar-10-negara-terkorup-di-dunia-2012/t364858.html>, pada tanggal 19 September 2012 pukul 22.23

### **Wawancara:**

1. Joko Budi Darmawan (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus)
2. Amri Kurniawan S.H.,M.H.
3. Greafik Loserte L.K.,S.H.,M.H.

4. Irma Arriyani,S.H.,M.H.
5. Andhi Ginanjar, S.H.

#### **BIODATA**

<b>NAMA</b>	<b>: SERLI PATULAK</b>
<b>NIM</b>	<b>: B111 09044</b>
<b>TEMPAT/TGL/LAHIR</b>	<b>: 11 MARET 1991</b>
<b>FAKULTAS</b>	<b>: HUKUM</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>AGAMA</b>	<b>: KRISTEN PROTESTAN</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>: JL. URIP SUMOHARJO NO.9 PANAİKANG</b>
<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>: PEREMPUAN</b>
<b>TGL LULUS</b>	<b>: 22 FEBRUARI 2013</b>
<b>NOMOR ALUMNI</b>	<b>: 9244</b>
<b>PRESTASI KELULUSAN</b>	<b>: CUM LAUDE</b>
<b>IPK</b>	<b>: 3,89</b>
<b>JUMLAH SKS</b>	<b>: 147</b>
<b>JUDUL SKRIPSI</b>	<b>:PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b>